Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi Infrastruktur, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Bali

The Influence of Population, Infrastructured Investment, and Economic Growth on Regional Tax Revenues in Bali

I Putu Oki Suciantara[1] , Ardan Gani Asalam[2]
[1] Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia
suciantara@student.telkomuniversity.ac.id,
[2] Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak
Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk dapat membiayai pembangunan infrastruktur serta menyediakan pelayanan publik untuk mensejahterakan penduduk. Penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh berbagai macam factor seperti, jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pajak daerah, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi penerimaan pajak daerah di Bali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitaif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yang dimana semua populasi digunakan sebagai sampel, sehingga memperoleh 90 sampel dari 9 kabupaten dan kota yang diteliti dari periode 2014 hingga 2023.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan jumlah penduduk, investasi infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. sementara jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pemerintah daerah, investor, serta masyarakat dengan memeberikan informasi melalui penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dalam memberikan informasi tambahan.

Kata Kunci- penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, investasi infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, Provinsi Bali

I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik. Di Bali, penerimaan pajak daerah memainkan peran yang sangat penting, terutama mengingat potensi ekonomi yang besar dari sektor pariwisata dan perdagangan (Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1, 2024). Pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan, termasuk pajak daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, serta mengurangi ketergantungan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Undang-Undang Republik Indonesia No 1, 2022). Pada penelitian ini, faktor – faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah yaitu jumlah penduduk, investasi infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi.

Faktor pertama yaitu jumlah penduduk di Provinsi Bali. Jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang menempati wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan. Pendatang dapat dianggap sebagai penduduk yaitu ketika mereka berada di suatu wilayah dengan lama kurang dari 3 sampai 6 bulan. Jumlah penduduk di Provinsi Bali mengalami peningkatan baik migran dari dalam negeri. Bali menarik banyak imigran dari dalam negeri untuk membangun usaha di sektor pariwisata. (Badan Pusat Statistiik, 2020).

Faktor kedua yaitu Investasi infrastruktur. Investasi Infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Infrastruktur yang memadai bukan hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, namun juga membuka peluang investasi yang lebih besar. Sebagai contoh pembangunan kereta bawah tanah oleh Provinsi Bali serta renovasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dengan meningkatnya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, infrastruktur yang berkembang pesat dapat memberikan dorongan yang signifikan terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan. Hal ini dapat menghasilkan aktivitas ekonomi baru, seperti pendirian usaha serta meningkatan kegiatan perdagangan, yang nantinya dapat memperluas basis pajak daerah. Semakin besar basis pajak, semakin tinggi juga potensi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,

2024).

Faktor terakhir yaitu Pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perumbahan situasi ekonomi di dalam suatu Negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai menjadi lebih baik(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik, maka aktifitas ekonomi masyarakat cenderung baik juga. Kenaikan pendapatan per kapita serta kemapuan daya beli masyarakat yang terus meningkat yang dapat menghasilkan daya konsumsi yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemerintah daerah Bali masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Sebagian pelaku usaha dan masyarakat masih cenderung melaporkan penghasilan mereka secara tidak akurat atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan, yang secara langsung mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Di samping itu, fluktuasi ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Ketika terjadi perlambatan ekonomi, laba perusahaan dan daya beli masyarakat cenderung menurun, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Ketidakpastian ekonomi ini menjadikan tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak semakin kompleks, karena ketidakstabilan tersebut menghambat perencanaan keuangan jangka panjang.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan pemberian wewenang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurus serta mengatur pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Distribusi yang adil mengenai keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan sistem pembagian dana yang bersifat adil, proporsional, transparan, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem desentralisasi. Perimbangan tersebut akan memperhitungkan potensi dan kebutuhan dari setiap daerah, serta jumlah alokasi dana yang digunakan untuk penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pemerintahaan (Kemetrian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Dalam kepentingan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang disertai dengan pengalihan sarana dan prasarana dan sumber pendanaan yang sesuai dengan kepentingan pemerintah yang di desentralisasikan. Pemerintah menggunakan prinsip desentralisasi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan (Kemetrian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dalam melaksanakan desentralisasi, sumber keuangan negara diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sumber penerimaan daerah, pelaksanaan desentralisasi dalam penerimaan asli daerah dari pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan hibah, pendapatan yang didapat sesuai dengan undang-undang, serta pendapatan transfer antar daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

B. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik (Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1, 2024). Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022, menyebutkan mengenai objek dan subjek pajak. Objek pajak merupakan sesuatu yang dikenakan pajak yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia No 1, 2022).

C. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistika Republik Indonesia tahun 2020 menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang menempati wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan. Dalam pengertian tersebut, penduduk mencakup berbagai kelompok dari berbagi karateristik yang dapat dipelajari dan didata lagi secara rutin oleh pemerintah. Jumlah penduduk di Provinsi Bali mengalami peningkatan baik migran dari dalam negeri. Bali menarik banyak imigran dari dalam negeri untuk membangun usaha di sektor pariwisata (Badan Pusat Statistiik, 2020).

Data penduduk yang telah didata oleh pemerintah yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan publik yang nantinya berhubungan dalam pembangunan sosial, ekonomi, serta politik. Jumlah penduduk diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan status migrasi yang memebrikan gambaran dari kependudukan di Indonesia (Badan Pusat Statistiik, 2020).

D. Investasi Infrastruktur

Investasi infrastruktur merupakan upaya dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia seperti pembangunan jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024). Pembangunan infrastruktru tersebut sangatlah penting bagi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah. Dengan tersedianya pembangunan sarana dan prasaran seperti jalan, bandara,

pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya maka aktivitas perdagangan akan menjadi lebih efektif (World Bank, 2019).

Investasi Infrastruktur seperti listrik dan telekomunikasi juga dapat memungkinkan terjadinya perkembangan pada wilayah yang masih terpencil. Ketika infrastruktur yang sebelumnya sulit untuk menjangkau wilayanh yang masih terpencil, maka dengan dilaksanakannya investasi infrastruktur kegiatan ekonomi dapat lebih berkembang. Hal tersebut dapat menciptakan basis data baru dari usaha lokal, properti, dan transaksi ekonomi yang dimana sebelumnya tidak terjangkau oleh pemerintah (World Bank, 2019).

E. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses perumbahan situasi ekonomi di dalam suatu Negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai menjadi lebih baik. Pertumbuhan dihitung mengunakan persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik, maka aktifitas ekonomi masyarakat cendrung baik juga. Kenaikan pendapatan per kapita serta kemapuan daya beli masyarakat yang terus meningkat yang dapat menghasilkan daya konsumsi yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu kelimpahan Sumber Daya Alam yang sangat berkontribusi dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Faktor inovasi dalam teknologi juga menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, serta kegiatan perdagangan memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi (Hartarto, 2023).

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data jenis sekunder yang diperoleh menggunakan cara cross sectional dan time series, menggunakan analisis regresi data panel yaitu laporan keuangan dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bali yang telah terdaftar di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia periode 2014-2023. Data panel menggabungkan cara cross sectional dan time series sehingga dapat mengatasi permasalahan heterogenitas yang tidak terobservasi (Sugiyono, 2020).

B. Operasional Variabel

Variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk atribut, nilai, objek, atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitan dan dipelajari untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Dependen

   Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah. penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik. Penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini dideteksi menggunakan jumlah pajak daerah yang dihasilkan oleh setiap kabupaten atau kota di Provinsi Bali (Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1, 2024).

2. Variabel Independen

   a. Jumlah Penduduk

      Variabel independent pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah penduduk. Menurut Badan Pusat Statistika Republik Indonesia tahun 2020 menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang menempati wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan. Dalam pengertian tersebut, penduduk mencakup berbagai kelompok dari berbagi karateristik yang dapat dipelajari dan didata lagi secara rutin oleh pemerintah (Badan Pusat Statistiik, 2020). Pengukuran jumlah penduduk menggunakan indikator yaitu jumlah penduduk produktif yang merupakan penduduk yang berusia 15 tahun hingga 60 tahun. Pengukuran tersebut mengindikasikan jumlah penduduk produktif yang terdapat di Provinsi Bali (Rachman Asy et al., 2020).

   b. Investasi Infrastruktur

      Variabel independent kedua yang digunakan untuk penelitian ini yaitu investasi infrastruktur. Menurut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2024 menjelaskan bahwa investasi infrastruktur merupakan upaya dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia seperti pembangunan jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya (Kementerian Perhubungan, 2024). Investasi infrastruktur diukur menggunakan belanja modal yang dicatat dalam laporan keuangan setiap daerah. Pengukuran tersebut mengindikasikan berapa banyak anggaran yang keluarkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan Pembangunan infrastruktur (Mongdong et al., 2020).

   c. Pertumbuhan Ekonomi

      Variabel ketiga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses perumbahan situasi ekonomi di dalam suatu Negara secara berkesinambungan

untuk menuju keadaan yang dinilai menjadi lebih baik. Pertumbuhan dihitung mengunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik, maka aktifitas ekonomi masyarakat cendrung baik juga. Kenaikan pendapatan per kapita serta kemapuan daya beli masyarakat yang terus meningkat yang dapat menghasilkan daya konsumsi yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan presentase dari Produk Domestik Regional Bruto (TB. Agung Amaludin & Anggun Putri Romadhina, 2023).

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu kelompok individu, objek, atau fenomena yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian untuk dianalisis lebih lanjut serta dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini yaitu kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode 2014-2023. Sampel merupakan subjek yang terdapat dalam suatu populasi yang ditetapkan untuk mewakili keseluruhan dalam suatu penelitian. Pemilihan dalam sampel tersebut dilakukan menggunakan teknik tertentu sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan (John W. Creswell, 2018). Pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu teknik pengambilan sampel yang Dimana semua populasi digunakan sebagai sampel. Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 9 kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Bali yaitu yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng dengan data observasi yaitu selama 10 tahun. Jadi total data observasi dalam penelitian ini yaitu 90 data observasi.

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel yang diteliti mengenai jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan skala rasio dan diukur dengan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Dilakukannya perhitungan minimum dan maksimum digunakan untuk memperlihatkan nilai tertinggi serta nilai terendah dari setiap variabel yang akan diteliti. Dan standar deviasi dipakai untuk menunjukkan variasi dari sebaran setiap variabel penelitian yang digunakan (Sugiyono, 2020).

2. Uji Asusmsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian tes yang digunakan untuk memverifikasi apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil dari analisis valid. Uji asumsi klasik menurut Sugiyono terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokolinearitas, uji normalitas, dan uji linearitas. Uji asumsi klasik yang peneliti pakai yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas karena untuk kebutuhan penelitian hasil regresi khususnya untuk data cross section dan time series dapat diinterpretasikan dengan menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hanya digunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dalam uji asumsi klasik dikarenakan dalam regresi data panel terdapat beberapa pengujian yang tidak signifikan, maka dari itu peneliti hanya memakai uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas untuk penelitian yang dilakukan (Agus Tri Basuki & Nano Prawoto, 2023).

3. Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen menggunakan data panel yaitu data time series dan data cross section (Sugiyono, 2020). Peneliti tidak dapat menyimpulkan regresi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan regresi data panel dapat diketahui serta dipilih ketika peneliti telah melakukan olah data untuk mengetahui regresi data panel yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunkan dalam penelitian ini yaitu *Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model*.

4. Pemilihan Data Panel

Pemilihan data panel dilakukan melalui tiga uji yaitu uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier yang berfungsi untuk mengetahui model terbaik yang sesuai dalam penelitian yang dilakukan. Pada tahapan pertama akan dilakukan uji chow yang dimana jika hasilnya fixed effect model maka lanjut lagi ke uji yang kedua yaitu uji hausman, dan jika hasilnya juga menyatakan fixed effect model maka tidak perlu dilanjutkan lagi ke uji yang ke tiga yaitu langrange multiplier. Jika hasil dari uji kedua berbeda dari hasil uji pertama, maka dilanjutkan ke uji ketiga yaitu langrange multiplier. Jadi data yang dipilih yaitu dengan hasil pengujian yang lebih banya (Agus Tri Basuki & Nano Prawoto, 2023). Ketiga uji tersebut yaitu uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier.

5. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan pengujian secara simultan dan parsial.

a. Uji Koefisien Determinan

Uji koefisien determinan dapat menunjukkan seberapa baik kemampuan model untuk menjelaskan setiap variasi dari varibel independen. Situasi di mana R2 ternilai kecil, hal tersebut dapat dianggap bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dalam

situasi di mana R2 ternilai hampir satu, hal tersebut dapat dianggap bahwa variabel independen hampir memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen

b. Uji Hipotesis Simultan

Uji F merupakan uji statistik dalam analisis regresi yang digunakan dalam menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F dalam penelitian ini yaitu:

H0: Jumlah Penduduk, Investasi Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Ha: Jumlah Penduduk, Investasi Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

c. Uji Hipotesis Parsial

Uji hipotesis menggunakan uji t merupakan salah satu uji analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Sugiyono et al., 2020). Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini yaitu:

a. Jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.

b. Jika nilai probabilitas (p-value) kurang dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Analisis Deskriptif

Tabel Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Penduduk	Investasi Infrastruktur	Pertumbuhan Ekonomi
Mean	532.911.012.222,22	472.713,78	273.119.555.555,55	3,5861
Maximum	5.676.000.000.000	957.800	1.241.110.000.000	11,29
Minimum	11.800.000.000	174.900	57.140.000.000	-16,55
Std.dev	1.035.935.222.006,95	212.446,45	238.359.830.474,99	4,60

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *mean* dari variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah sebesar 532.911.012.222,22 dengan nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata yaitu sebesar 1.035.935.222.006,95 yang dapat diartikan bahwa data yang digunakan bervariasi. Nilai maksimum dari variabel penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 5.676.000.000.000 pada Kabupaten Badung pada tahun 2023 yang dikarenakan Kabupaten Badung merupakan pusat pariwisata dari Provinsi bali. Nilai mean dari variabel jumlah penduduk yaitu 472.713,28 serta nilai dari standar deviasi jumlah penduduk sebesar 212.446,45. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki data yang bervariasi atau berkelompok yang menunjukkan bahwa data jumlah penduduk relatif terpusat disekitar nilai rata-rata, dengan variasi antar nilai yang tidak signifikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penerimaan pajak daerah dari jumlah penduduk cendrung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Pada nilai maksimum variabel jumlah penduduk ini sebesar 957.800 yaitu pada kota Denpasar yang dikarenakan Kota Denpasar merupakan Ibu Kota dari Provinsi Bali serta menajadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi Bali. Serta nilai minimum sebesar 174.900 yang terdapat pada Kabupaten Klungkung yang dikarenakan Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Bali. Variabel investasi infrastruktur memiliki nilai *mean* sebesar 273.119.555.555,55 dengan nilai standar deviasi sebesar 238.359.830.474,99 yang menunjukkan nilai mean atau rata-rata lebih besar daripada nilai standar deviasi yang dapat diartikan bahwa data dari variabel investasi infrastruktur tidak memiliki data yang terlalu bervariasi atau berkelompok. Dengan kata lain data jumlah penduduk relatif terpusat disekitar nilai rata-rata, dengan variasi antar nilai yang tidak signifikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penerimaan pajak daerah dari investasi infrastruktur cendrung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Pada nilai maksimum dalam variabel investasi infrastruktur sebesar 1.241.110.000.000 yang terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2017 yang dikarenakan pada tahun tersebut dilakksanakan sebanyak 45 dari 320 proyek besar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan anggaran lebih dari 1,2 Trilliun Rupiah. Terakhir yaitu variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai *mean* sebesar 3,5861 dengan nilai standar deviasi 4,60 yang menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil daripada nilai standar deviasi. Pada variabel Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai maximum sebesar 11,29 yang terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2023 dikarenakan Kabupaten Badung merupakan pusat pariwisata dari Provinsi bali. Desa-desa terkenal seperti Kuta, Legian, Canggu, dan Seminyak merupakan wilayah

yang terdapat pada Kabupaten Badung. Selain hal tersebut, pemerintah kabupaten badung melaksanakan program untuk memebrantas kemiskinan yang dipasang pada tahun 2023 dengan anggaran mencapai 876.000.000.000

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipergunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Sugiyono, 2020). Berikut merupakan hasil dari uji multikolinearitas.

Variable	Coefficient Variable	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.13E+22	6.759360	NA
Jumlah Penduduk (X1)	7.82E+10	6.657547	1.108357
Investasi Infrastruktur (X2)	0.065507	2.722101	1.169451
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	1.59E+20	1.714200	1.063344

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu jumlah penduduk dengan nilai VIF sebesar 1,108, investasi infrastruktur memiliki nilai VIF sebesar 1,169, serta nilai VIF untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 1,063. Berdasarkan hasil tersebut, nilai VIF dari variabel independen < dari 10 yang berarti tidak terkena multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi dari variabel-variabel yang diuji.

c. Uji Heteroskedaktisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara pengamatan yang satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2020). Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas.

F-statistic	**19.88415**	**Prob. F(3,86)**	**0.8623**
Obs*R-squared	36.85980	Prob. Chi-Square(3)	0.8495
Scaled explained SS	55.83140	Prob. Chi-Square(3)	0.8657

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai dari Obs*R-squared lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa data terbebas dari heterokdastisitas serta memenuhi syarat uji asumsi klasik.

d. Uji Pemilihan Regresi data Panel

1. Uji Chow

Uji chow berfungsi untuk membandingkan model Fixed Effect dan model Common Effect, untuk dapat menunjukkan hasil yang lebih cocok untuk penelitian ini.

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.007283	(8,78)	0.0000
Cross-section Chi-square	72.241316	8	0.0000

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.12 menunjukkan Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 < 0,05 yang menunjukkan H0 ditolak sehingga model yang terpilih dalam uji chow yaitu Fixed Effect Model. Selanjutnya akan dilaksanakan pengujian hausman yang bertujuan untuk menentukan model yang lebih maksimal diantara Fixed Effect Model atau random effect.

2. Uji Hausman

Uji Hausman Berfungsi dalam menetukan model fixed effect dan random effect yang paling cocok untuk penelitian ini.

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.098972	3	0,0000

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan Uji Hausman pada tabel 4.13 menunjukan bahwa hasil dari Prob. Cross-section random yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak sehingga model yang terpilih dalam Uji Hausman yaitu Fixed Effect Model. Tidak perlu melanjutkan ke Uji Langrange Multiplier dikarenakan pada Uji Chow serta Uji Hausman telah menunjukkan dua hasil yang sama yaitu dengan pendekatan Fixed Effect Model.

e. Hasil dari pemeilihan Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil data yang sudah diolah yang menunjukkan bahwa dalam uji chow serta uji hausman memperolehkan hasil yaitu Fixed Effect Model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari Fixed Effect Model yang telah dilakukan.

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 04/15/25 Time: 14:06 Sample: 2014 2023 Periods included: 10 Cross-sections included: 9 Total panel (balanced) observations: 90				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-49.400.000.000	372.000.000.000	-0.132779	0.8947
X1	332.432,1	792636.6	0.419400	0.6761
X2	27.400.000.000	9.570.000.000	3.498443	0.0008
X3	1,197536	0.342305	2.860727	0.0054
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.885710	Mean dependent var	533.000.000.000	
Adjusted R-squared	0.869592	S.D. dependent var	1.040.000.000.000	
S.E. of regression	374000000000	Akaike info criterion	56,25700	
Sum squared resid	1.090.000.000.000	Schwarz criterion	56,59031	
Log likelihood	-2519.565	Hannan-Quinn criter.	56.39141	
F-statistic	54.95230	Durbin-Watson stat	1.000165	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Prob(F-statistic)	0.007235			

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

1. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (R2) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan dari variasi dalam suatu variabel dependen yang akan ditentukan terhadap variabel independent. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) yang terdapat pada tabel 4.17 menunjukkan nilai adjusted r-square sebesar 0,869592 atau 86,9592%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 86,9592% dari 100% dengan sisa 13,0408% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Meskipun setiap variabel yang telah diuji memberikan kontribusi yang signifikan, masih terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi variabel-variabel tambahan yang berperan penting.

2. Hasil Uji Simultan F

Uji simulatn F digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara bersamaan. Terdapat kriteria yang mendukung pengujian simultan F, sebagai berikut:

a. Jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.

b. Jika nilai probabilitas (p-value) kurang dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.

Berdasarkan hasil uji simultan F pada tabel 4.17 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa Ha diterima serta H0 ditolak yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan atau bersamaan berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya penerimaan pajak daerah.

3. Uji Signifikansi Parsial T

Uji hipotesis menggunakan uji t merupakan salah satu uji analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial t digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu Jumlah penduduk, Investasi Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi secara terpisah terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini yaitu:

a. Jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.

b. Jika nilai probabilitas (p-value) kurang dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.

Pada umumnya, uji signifikansi t menunjukkan seberapa besar pengaruh dari suatu variabel independent terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan melalui hasil dari uji signifikansi t yang terdapat pada tabel 4.17 seperti berikut:

1. Nilai Probabilitas variabel jumlah penduduk (X1) sebesar 0,6761>0,05 yang dapat diartikan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Maka jumlah penduduk tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Nilai probabilitas variabel investasi infrastruktur (X2) sebesar 0,0008<0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Maka investasi infrastruktur berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Nilai probabilitas variabel pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 0,0054<0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang terdapat di Provinsi Bali. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Bali tahun 2014 hingga 2023. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 sampel yang didapatkan dengan metode sampel jenuh yang merupakan teknik pengambilan sampel yang Dimana semua populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa Kesimpulan yaitu:

1. Variabel independent yaitu jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah.
2. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jumlah penduduk yang tinggi tidak akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Bali focus dalam sektor pariwisata yang menjadikan penerimaan pajak daerah cenederung lebih besar diperoleh dari sektor pariwisata. Namun pendapatan tersebut lebih tinggi dihasilkan oleh wisatawan dari mancanegara atau internasional ketimbang penduduk local daerah Provinsi Bali maupun wisatawan dari dalam negeri diluar Provinsi Bali.
3. Variabel investasi infrastruktur berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin banyak belanja modal yang direalisasikan oleh pemerintah untuk investasi

infrastruktur dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dipengaruhi karena pemerintah focus dalam menggunakan anggaran untuk melakukan pembangunan khususnya Pembangunan yang condong ke sektor pariwisata seperti bandara, jalan raya, serta Pembangunan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk menunjang sektor pariwisata yang mejadikan pariwisata di Provinsi Bali menjadi lebih padat dengan wisatawan dari mancanegara maupun local yang berdatangan untuk menikmati keindahan alam provinsi Bali yang dapat mengahasilkan penerimaan pajak daerah.

4. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase dari pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam suatu daerah yang dapat dilihat melalui nilai presentase Produk Domestik Regional Bruto yang semakin meningkat dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh sektor pariwisata yang menjadi sektor yang paling mempengaruhi perekonomian Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar serta pertumbuhan ekonomi dari Kota Denpasar yang menjadi pusat pemerintahan atau Ibu Kota dari provinsi Bali.

REFERENSI

Agus Tri Basuki, & Nano Prawoto. (2023). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistiik. (2020). Jumlah Penduduk. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. https://www.bps.go.id/id

Hartarto, M. A. B. A. (2023). Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.

John W. Creswell. (2018). Research Design (Helen SAlmon, Ed.; 5th ed.). SAGE Publication.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). KAJIAN FISKAL REGIONAL.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Perhubungan. (2024, November 6). Realisasi PNBP Per November 2024 Capai Rp10,1 Triliun, Kemenhub Optimis Mampu Lebihi Target PNBP 2024. Kementerian Perhubungan republik Indonesia. https://www.dephub.go.id/post/read/realisasi-pnbp-per-november-2024-capai-rp10,1-triliun,-kemenhub-optimis-mampu-lebihi-target-pnbp-2024

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). Konektivitas Transportasi Buka Peluang Perkembangan Perekonomian Daerah. Kementerian Perhubungan. https://dephub.go.id/post/read/konektivitas-transportasi-buka-peluang-perkembangan-perekonomian-daerah

Kemetrian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021. Kemetrian Keuangan Republik Indonesia.

Mongdong, C. M., Masinambow, V. A. J., Tumangkeng, S., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). ANALISIS PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TOMOHON. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18, 1–12.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1. (2024). PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 370. https://peraturan.bpk.go.id/Details/276603/perda-prov-bali-no-1-tahun-2024

Rachman Asy, F., Nirwanto, N., Siswati, A., & Siswati Fiki Rachman Asy, A. (2020). Aris Siswati; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang; Jl. Journal of Regional Economics Indonesia, 62–13. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Dr. IR. Sutopo, Ed.; 1st ed.). Alfabeta Bandung. https://www.scribd.com/embeds/699523859/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf

TB. Agung Amaludin, & Anggun Putri Romadhina. (2023). PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2017-2021. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 4, 1–15.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1. (2022). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

World Bank. (2019). Indonesia: Pembangunan Terintegrasi untuk Peningkatan Kehidupan di Daerah Perkotaan yang Terus Berkembang. World BAnk. https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2019/06/12/indonesia-integrated-development-to-improve-lives-of-growing-urban-population